

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 557-561
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14628154>

Analisis Transparansi Keuangan Publik di Era Digital: Studi Kasus KPPN Tanjungpinang

Nur Hafifa¹, Vyona Erlisya¹, Putri Nabilah Umaira³, Wahjoe Pangestoeti⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: nurhafifasty1@gmail.com¹ vyonaerlisya8@gmail.com² putrinabilahu@gmail.com³
wahjoepangestoeti@umrah.ac.id⁴

Abstrak

Transparansi keuangan publik merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di era digital, transparansi semakin diakselerasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana KPPN Tanjungpinang, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Keuangan, memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang mendalam, termasuk analisis unggahan media sosial resmi KPPN Tanjungpinang, laporan keuangan publik, serta prinsip-prinsip e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN Tanjungpinang secara aktif membagikan informasi keuangan publik, seperti realisasi APBN, alokasi anggaran, dan program kerja melalui platform media sosial. Strategi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Kata Kunci : *Transparansi, Media Sosial Pemerintah, Tata kelola yang baik, E-Government*

Asbtract

Public financial transparency is one of the core principles of good governance. In the digital era, transparency is increasingly accelerated through the use of information and communication technology, including social media. This study aims to analyze how KPPN Tanjungpinang, as one of the technical implementation units of the Ministry of Finance, leverages social media to enhance transparency in public financial management. The data in this study were collected through an in-depth literature review, including an analysis of the official social media posts of KPPN Tanjungpinang, public financial reports, and e-government principles. The results show that KPPN Tanjungpinang actively disseminates public financial information, such as state budget realization, budget allocations, and work programs, through social media platforms. This strategy not only improves institutional accountability but also strengthens relationships with the public.

Keywords : *Transparency, Social Media in Government, Good Governance, E-Government*

PENDAHULUAN

Transparansi keuangan publik menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Dalam era di mana informasi dapat diakses dengan mudah, masyarakat semakin menuntut keterbukaan mengenai pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya publik. Transparansi tidak hanya berfungsi untuk mencegah praktik korupsi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan yang diambil, sehingga menciptakan iklim pemerintahan yang lebih baik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial muncul sebagai platform yang signifikan dalam penyebaran informasi. Media sosial memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara pemerintah dan masyarakat, memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengawasan. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu keuangan, termasuk anggaran negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang menjadi studi kasus yang relevan untuk mengeksplorasi penerapan transparansi keuangan dalam konteks media sosial. KPPN Tanjungpinang memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan anggaran di wilayahnya. Dengan memanfaatkan media sosial, KPPN dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis

bagaimana KPPN Tanjungpinang mengimplementasikan praktik transparansi melalui media sosial, serta dampaknya terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis penerapan transparansi keuangan publik melalui media sosial oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik transparansi yang dilakukan oleh KPPN Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran melalui platform media sosial, serta dampaknya terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang meliputi jurnal, buku, laporan kebijakan, serta dokumen resmi terkait transparansi keuangan publik dan peran media sosial dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi keuangan publik adalah aspek penting yang harus dilaksanakan dan diinformasikan oleh penyelenggara keuangan pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, (Ball, 2009) mendefinisikan transparansi dalam tiga pengertian utama: (1) sebagai prinsip atau norma perilaku yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi, (2) sebagai bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi, dan (3) sebagai konsep yang kompleks, terutama berkaitan dengan analisis kebijakan publik dan pelaksanaan program.

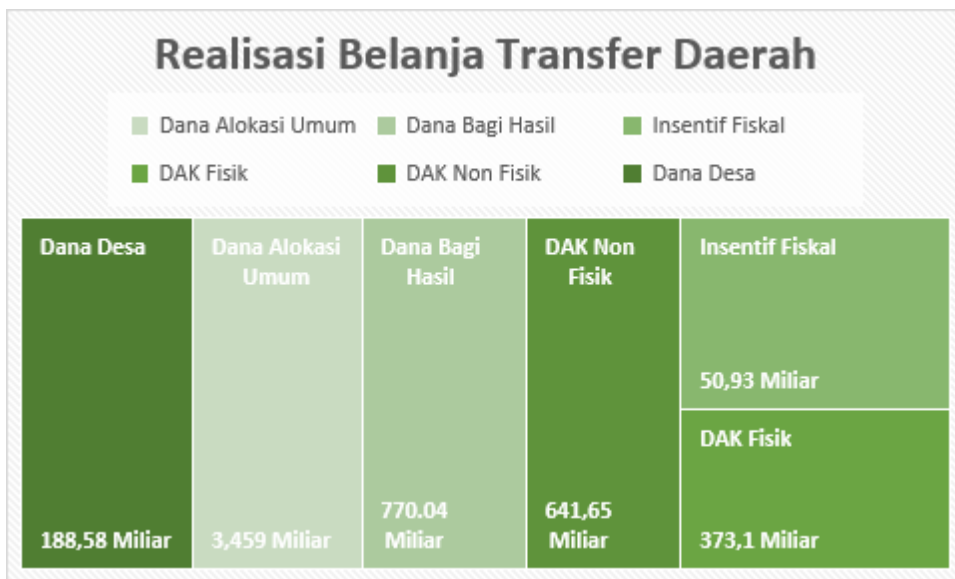
KPPN Tanjungpinang menjadi salah satu lembaga yang menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi, terutama di era digital. Melalui platform media sosial seperti Instagram, KPPN Tanjungpinang secara aktif membagikan informasi keuangan untuk mendukung transparansi kepada masyarakat luas.



Sumber: Instagram KPPN Tanjungpinang (@kppntanjungpinang)

Sebagai contoh, berikut adalah data realisasi APBN wilayah kerja KPPN Tanjungpinang per 30 November 2024 yang diunggah melalui akun Instagram @kppntanjungpinang. Hingga tanggal tersebut, KPPN Tanjungpinang telah merealisasikan APBN sebesar Rp8,88 triliun dari total pagu Rp10,23 triliun (86,77%). Adapun rincian jenis belanja yang penyalurannya dilakukan melalui KPPN Tanjungpinang meliputi:

- Belanja pegawai: Rp1,24 triliun
- Belanja barang: Rp1,36 triliun
- Belanja modal: Rp0,78 triliun
- Belanja transfer: Rp5,48 triliun
- Belanja bansos: Rp7,69 miliar



Sumber : Data diolah dari unggahan Instagram resmi KPPN Tanjungpinang (@kppntanjungpinang)

Selain berbagi informasi terkait transparansi keuangan publik, KPPN Tanjungpinang juga aktif mengunggah kegiatan lain, seperti Rekonsiliasi Sisa DAK Fisik Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kepulauan Riau, serta unggahan komitmen mereka sebagai lembaga yang mendukung keberlanjutan pembangunan melalui zona integritas. Komitmen ini diwujudkan melalui moto GURINDAM: Gratis, Utama, Responsif, Inovatif, Nyaman, Dedikasi, Akuntansi, Modern. Selain itu, mereka juga menyediakan informasi seperti Kalender Akademik Panduan Akhir Tahun Anggaran 2024.

Partisipasi aktif lembaga pemerintah seperti KPPN Tanjungpinang sangat penting di era digital untuk memastikan transparansi keuangan publik lebih mudah diakses. (Crespo et al., 2018) menjelaskan bahwa e-government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta menyediakan informasi dan layanan pemerintahan. Prinsip tata kelola yang baik (good governance) mencakup berbagai aspek yang saling terkait, termasuk akuntabilitas, transparansi, efisiensi, supremasi hukum, partisipasi, responsivitas, dan perencanaan strategis. Tak hanya aktif di sosial media, KPPN Tanjungpinang melayani masyarakat dengan baik, terlihat dari Skor Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KPPN Tanjungpinang Periode Triwulan IV Tahun 2024 senilai 4,88 dari skala 5.



Sumber: Instagram KPPN Tanjungpinang (@kppntanjungpinang)

Hasil survei kepuasan masyarakat yang ditampilkan dalam kedua gambar di atas mencerminkan pencapaian signifikan KPPN Tanjung Pinang dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Nilai rata-rata kepuasan sebesar 4,974 pada Semester II Tahun 2023 dan 4,88 pada Triwulan IV Tahun 2024 (dari skala 5) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap layanan yang diberikan. Salah satu faktor penting yang dapat dihubungkan dengan hasil ini adalah upaya KPPN dalam menerapkan transparansi, terutama melalui media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif.

Dalam era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi alat utama bagi instansi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Transparansi melalui media sosial berarti memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. KPPN Tanjung Pinang kemungkinan besar telah memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan berbagai informasi penting, seperti prosedur layanan, kebijakan baru, capaian kerja, dan hasil evaluasi. Informasi yang terbuka dan mudah diakses ini membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan institusi pemerintah, serta membangun rasa percaya bahwa layanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, media sosial juga menjadi saluran penting untuk menerima masukan, saran, dan kritik dari masyarakat. Dengan menanggapi respons masyarakat secara aktif, KPPN dapat menunjukkan komitmen mereka dalam mendengarkan dan menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan publik. Proses interaktif ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat reputasi KPPN sebagai institusi yang responsif dan transparan.

Hasil survei ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat menghargai keterbukaan informasi yang ditunjukkan oleh KPPN. Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan layanan diproses secara adil serta transparan, masyarakat merasa dihargai sebagai bagian penting dari sistem pelayanan publik. Hal ini menciptakan rasa kepuasan yang lebih besar, sebagaimana tercermin dalam skor survei yang tinggi.

Transparansi keuangan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa dampak utama yang timbul dari transparansi ini antara lain:

1. **Membangun Legitimasi Kebijakan.** Transparansi dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan fiskal dan moneter berperan penting dalam menciptakan legitimasi di mata publik. Ketika masyarakat merasa cukup jelas dan akurat dalam mendapatkan informasi tentang kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral, mereka akan cenderung lebih menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Legitimasi ini, sangat penting dalam konteks terutama yang di mana kebijakan yang akan di ambil memungkinkan timbulnya kontroversi atau memerlukan pengorbanan dalam jangka pendek.
2. **Meningkatkan Partisipasi Publik.** Akses terhadap informasi yang terbuka mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan dapat berkontribusi lebih aktif dalam diskusi publik mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Keterlibatan dalam partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat.
3. **Mencegah Misi Informasi dan Spekulasi.** Kurangnya transparansi dapat memicu munculnya misi informasi dan spekulasi yang akan merugikan kepercayaan publik. Contohnya, jika pemerintah tidak terbuka mengenai kondisi anggaran, masyarakat mungkin berasumsi bahwa ekonomi sedang dalam keadaan lebih buruk daripada kenyataannya, yang dapat menyebabkan kepanikan dan penarikan dana secara besar-besaran dari bank. Dengan komunikasi yang transparan, pemerintah dan bank sentral dapat menghindari spekulasi yang tidak berdasar dan menjaga kepercayaan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi keuangan publik melalui media sosial oleh KPPN Tanjungpinang memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran negara. Pemanfaatan platform seperti Instagram memungkinkan KPPN untuk secara terbuka, membagikan informasi mengenai realisasi APBN, alokasi anggaran, serta kegiatan lainnya,

yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik. Keunggulan dari pendekatan ini adalah terciptanya saluran komunikasi yang lebih terbuka, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait isu-isu keuangan. Ke depannya, KPPN dan Lembaga Pemerintah lainnya dapat terus mengembangkan penggunaan media sosial untuk mencapai transparansi yang lebih baik, dengan memperhatikan keberagaman audiens dan cara penyampaian informasi yang lebih jelas dan terperinci. Hal ini juga dapat membuka kemungkinan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter secara lebih efektif.

REFERENSI

- Ball, C. (2009). What Is Transparency? *Public Integrity*, 11(4), 293–308. <https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922110400>
- Crespo, C., Ripoll, V., Tamarit, C., & Valverde, R. (2018). Institutional characteristics and managers' perceptions of accounting information: impact on e-government use and organisational performance. *Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad*, 47(3), 352–365. <https://doi.org/10.1080/02102412.2017.1416743>
- Faiz Muhlizi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl Mayjen Sutoyo No, A., & Jakarta, C. (n.d.). *Penguatan Akses Informasi Publik melalui Teknologi Informasi sebagai Bentuk Transparansi ... (Arfan Faiz Muhlizi)*.
- Marthalena, Y., Program, S., S1, A., Sosial, F., & Bisnis, D. (n.d.). *PENGUATAN AKSES INFORMASI PUBLIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA*.
- Nabila, P., & Sari, V. F. (2024). Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6 (2), 500–516. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1481>
- Sheka, A. I. R. A. (2022). *Barenlitbang_003. Evaluasi Biasa Keluaran Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pinang Tahun 2019-2021*.
- Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, & Arie Elcaputera. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401-420.